

**Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) Pada Dimensi Makro Tahun 2021**

**Dewi Kresno Murti**

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta

Email : [dewikm0311@gmail.com](mailto:dewikm0311@gmail.com)

**Abstract**

This research measures performance using a macro-dimensional index approach based on the National Zakat Index to find out whether BAZNAS Sukoharjo Regency has a good performance. This research is a descriptive quantitative research. The data in this research were obtained through interviews, documentation, and literature studies from previous research. Data analysis in this study uses the Multi Stage Weighted Index method. The results of the calculation of the performance of the Sukoharjo Regency BAZNAS calculated based on the National Zakat Index received a score of 0.474 which means it is quite good. This shows that the Sukoharjo Regency BAZNAS has a local regulation on ZIS management so that the regulation indicator gets a value of 1 which means very good. BAZNAS Sukoharjo Regency also received an allocation of APBD funds in 2021 of IDR. 200,000,000 with operational costs of IDR. 742,675,494 so that the APBD indicator received a score of 0.25 which means it is not good. The institutional database indicator received a score of 0.2475 which means it is not good.

**Keywords:** Performance; IZN; BAZNAS Sukoharjo Regency

**Abstrak**

Penelitian ini melakukan pengukuran kinerja menggunakan pendekatan indeks dimensi makro berdasarkan Indeks Zakat Nasional untuk mengetahui apakah BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki kinerja yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Data-data pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode *Multi Stage Weighted Index*. Hasil perhitungan kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang dihitung berdasarkan Indeks Zakat Nasional mendapat nilai 0,474 yang berarti cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki Perda tentang pengelolaan ZIS sehingga pada indikator regulasi mendapat nilai 1 yang berarti sangat baik. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo juga mendapat alokasi dana APBD tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000 dengan biaya operasional Rp. 742.675.494 sehingga indikator APBD mendapat nilai 0,25 yang berarti kurang baik. Pada indikator database lembaga mendapat nilai 0,2475 yang berarti kurang baik.

**Kata Kunci:** Kinerja; IZN; BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

## PENDAHULUAN

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>1</sup> Untuk mencapai hasil yang diinginkan dan berkualitas dari suatu lembaga tentu tidak lepas dari yang namanya kinerja lembaga. Kinerja lembaga merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Kinerja lembaga BAZNAS itu sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan *muzakki*. Suatu hal yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan kehadiran lembaga zakat yaitu dengan pelaporan atau pengauditan dalam setiap penghimpunan hingga pendistribusian zakat pada setiap tahunnya. Dengan adanya pelaporan menunjukkan kinerja lembaga zakat pada tahap yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga akan percaya kepada lembaga zakat jika kinerja dari lembaga zakat itu baik. Kinerja lembaga zakat perlu mendapatkan perhatian khusus karena lembaga zakat merupakan lembaga yang kompleks.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode lalu.<sup>2</sup>

BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi zakat yang cukup besar, pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berhasil menghimpun mencapai 3,78 miliar. Pada tahun selanjutnya 2020 terhimpun mencapai 3,91 miliar. Pada tahun 2019 ke tahun selanjutnya mengalami sedikit peningkatan dalam penghimpunan, tetapi keduanya masih jauh untuk mencapai potensi zakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berhasil menghimpun mencapai 5,55 miliar. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi juga belum mencapai potensi zakat yang ada.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat masih rendah dari potensi penghimpunan zakat. Hal ini patut ditindaklanjuti apakah karena faktor

---

<sup>1</sup> Nawawi, Ismail, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013)

<sup>2</sup> Junda Taqiyah H, Pengukuran Kinerja Baznas Bekasi Dengan Indikator Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional, *Skripsi* (Malang 2020).hlm.7.

<sup>3</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

kurangnya sosialisasi, edukasi dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar penghimpunan zakat dapat meningkat pada setiap tahunnya. Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat dan memberikan alokasi APBD setiap tahunnya untuk operasional BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Namun antara masyarakat, Lembaga zakat, dan pemerintah harus selalu bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo tingkat penghimpunan zakat dipengaruhi oleh kinerja lembaga.

Kinerja lembaga zakat dalam hal pengelolaannya dapat dievaluasi dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional yang dibuat oleh pusat kajian strategis BAZNAS. Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan suatu alat ukur yang dapat mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada tingkat nasional hingga daerah. Dengan adanya Indeks Zakat Nasional (IZN) diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kesejahteraan dari *mustahik* serta mengetahui kinerja dari lembaga zakat apakah sudah pada tahap yang telah ditentukan oleh Indeks Zakat Nasional.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana kinerja perzakatan di Kabupaten Sukoharjo khususnya di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang mencakup peran pemerintah dan lembaga zakat berdasarkan Indeks Zakat Nasional yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS tahun 2016.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, dan akurat. Hal ini peneliti menggunakan teknik perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai variabel dengan metode *Multi Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan kepada masing-masing variabel dan dilakukan secara bertahap.

Teknik estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai indeks dalam

---

<sup>4</sup> Ratih Nurasri, Analisis Kinerja Zakat Daerah Dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional Pada Baznas Kota Tangerang Selatan, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 9

indikator kelembagaan pada IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun IZN, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural.

Langkah pertama membuat skoring dari angka 1 sampai 5, angka 1 menunjukkan kondisi sangat lemah sementara angka 5 menunjukkan kondisi sangat kuat. Skoring ini berlaku untuk semua variabel baik dari dimensi makro maupun mikro. Langkah kedua, menghitung nilai indeks masing-masing variabel. Dengan rumus

$$I_i = \left( \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$$

Keterangan :

$S_i$  = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel  $i$

$S_{\max}$  = Skor maksimal

$S_{\min}$  = Skor minimal

$I_i$  = Indeks pada variabel  $i$

Langkah ketiga, menghitung nilai indeks indikator (indikator data base lembaga zakat, kelembagaan dan dampak zakat) dengan cara mengalikan masing-masing bobot kontribusi variabel dengan masing-masing nilai indeks variabel. Dengan rumus

$$X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$$

Keterangan:

$X_3$  : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

$X_{31}$  : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzaki, dan Mustahik

$X_{32}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah Rumah Tangga

$X_{33}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional

Khusus pada tahap ini, indikator regulasi dan anggaran pemerintah tidak perlu dihitung.

Langkah keempat, menghitung nilai indeks dimensi makro dan mikro dengan cara mengalikan masing-masing bobot kontribusi indikator dengan masing-masing nilai indeks indikator dengan rumus

$$X = 0,30X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3$$

Keterangan :

$X$  : Indeks Dimensi Makro

$X_1$  : Indeks Indikator Regulasi

$X_2$  : Indeks Indikator Dukungan APBD

X3 : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

**Tabel 1**  
**Komponen Indeks Dimensi Makro**

Komponen Indeks Dimensi Makro					
Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Makro (X)	0.40	Regulasi (X1)	0.30	Regulasi	1.00
		Dukungan APBD (X2)	0.40	Dukungan APBD	1.00
		Database lembaga zakat (X3)	0.30	Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik (X31)	0.33
				Rasio muzakki individu terdaftar (X32)	0.33
				Rasio muzakki badan terdaftar (X33)	0.33

Sumber: Puskas BAZNAS 2016

Hasil dari pengukuran indeks zakat nasional di bagi kedalam 5 kriteria yaitu:

- a. 0 – 0,2 = Tidak Baik
- b. 0,21 – 0,4 = Kurang Baik
- c. 0,41 – 0,6 = Cukup Baik
- d. 0,61 – 0,8 = Baik
- e. 0,81 – 1,0 = Sangat Baik

## PEMBAHASAN

### Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, atau perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.<sup>5</sup> Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan.

Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode.<sup>6</sup> Manajemen kinerja untuk lembaga seperti BAZNAS dan LAZ membutuhkan suatu proses sistematis sehingga perlu dibuat sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal. Pengukuran kinerja suatu lembaga dilakukan agar lembaga tersebut dapat terus memperbaiki kinerja lembaganya. Jika suatu lembaga terus belajar untuk memperbaiki kinerjanya, maka lembaga tersebut akan tumbuh berkembang menjadi lembaga yang sehat dengan kepercayaan masyarakat yang baik.

### **Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat**

Pengukuran kinerja suatu organisasi dilakukan agar organisasi yang bersangkutan bisa terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya. Jika suatu organisasi terus memperbaiki kinerjanya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik. Untuk mengukur kinerja suatu lembaga, dalam hal ini lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ memiliki beberapa model pengukuran yang bisa digunakan diantaranya Indeks Desa Zakat (IDZ), *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), *Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) dan *International Standard of Zakat Management* (ISZM), dan Indeks Zakat Nasional (IZN).<sup>7</sup>

### **Indeks Zakat Nasional**

Indeks Zakat Nasional (IZN) yaitu sebuah alat ukur yang dibentuk oleh pusat kajian strategis BAZNAS pada tahun tahun 2016. IZN diharapkan mampu menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. IZN pada akhirnya menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat

---

<sup>5</sup> Nawawi, Ismail, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm. 87

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm 2

<sup>7</sup> Yandi Bastiar, Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia, *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019, vol.6 no.1).hlm. 44

secara nasional.<sup>8</sup>

IZN secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi mikro dan dimensi makro. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.<sup>9</sup>

Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Pada dimensi makro terdapat tiga indikator yaitu indikator regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator database lembaga yang memiliki turunan, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

### **Indikator Regulasi**

Indikator regulasi berupaya melihat seberapa besar perhatian pemerintah terhadap regulasi zakat baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang zakat diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan zakat secara regional maupun nasional. Selain itu, agar pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih terarah sesuai kebutuhan pada daerah tersebut. Peraturan Daerah ini bersifat lebih kuat daripada imbuhan kepala daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah ini sangat penting untuk lebih mengikat masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi Peraturan di daerah. Termasuk Peraturan Daerah zakat untuk membayar zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/954 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di Jaringan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Kelompok Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat mendukung perzakatan

---

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016), hlm. 17

<sup>9</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>10</sup> Junda Taqiyah H, *Pengukuran Kinerja Baznas Bekasi Dengan Indikator Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional*. Skripsi (Malang 2020).hlm.31.

di Kabupaten Sukoharjo. Pada indikator regulasi, apabila suatu Kabupaten/Kota memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan zakat maka mendapatkan skor 5 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Nilai indeks pada indikator regulasi ini adalah 1 yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini sangat baik.

### **Indikator APBD**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya indikator APBD ini tidak jauh berbeda dengan indikator lain yaitu, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemerintah dan DPRD terhadap perzakatan di daerah. Berapa banyak APBD yang disediakan pemerintah untuk membantu operasional lembaga zakat yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>11</sup>

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 200.000.000. alokasi APBD yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada BAZNAS Kabupaten Sukoharjo itu digunakan untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya. Pada Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 terdapat jumlah penggunaan dana sebesar Rp. 742.675.494 untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Selama 2021.

Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dukungan APBD pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sebesar 26% dihitung dengan cara jumlah dukungan APBD dibagi dengan biaya operasional BAZNAS tahun 2021. Maka berdasarkan tabel skoring pada indikator dukungan APBD BAZNAS Kabupaten Sukoharjo mendapatkan skor 2 dengan kategori lemah karena memiliki rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional sekurang-kurangnya 20%. Nilai indeks dari indikator dukungan APBD ini adalah 0,25 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dari sisi ini masih kurang baik.

### **Indikator Database**

Indikator database ini ada untuk melihat seberapa lengkap data yang dimiliki oleh

---

<sup>11</sup> Sulhan Zainul, *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram Dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019. Hlm.29.



lembaga zakat. Lengkapnya data yang dimiliki lembaga zakat maka dapat dianggap bahwa lembaga zakat tersebut memiliki administrasi yang baik. Selain dari sistem administrasi lembaga zakat, pada indikator ini juga melihat bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan perzakatan di daerahnya.<sup>12</sup>

Pada indikator database ini ada guna mengetahui kelengkapan data yang dimiliki oleh lembaga zakat. Dengan kelengkapan data bisa dipastikan bahwa administrasi BAZNAS baik. Indikator database terbagi menjadi tiga variabel yaitu, 1) variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik; 2) variabel rasio jumlah muzakki individu terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah; 3) variabel rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha nasional/daerah. NPWZ adalah Nomor Pokok Wajib Zakat.

Pada variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik, BAZNAS Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki database lembaga zakat resmi di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk database muzakki dan mustahik BAZNAS Kabupaten Sukoharjo di tahun 2021 tersusun rapi di Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki muzakki sebanyak 2.712 yang memiliki NPWZ, dan mustahik sebanyak 11.055 orang. Dengan hasil data yang didapat tersebut maka pada variabel ini BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki dua dari tiga database yang ada yaitu database jumlah muzakki dan mustahik. Maka berdasarkan tabel 3.1 skoring indeks dimensi makro pada IZN, skor pada variabel ini adalah 3 yang berarti cukup. Nilai indeksnya 0,5 yang berarti kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo pada variabel database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki, dan mustahik adalah cukup baik.

Pada variabel rasio jumlah muzakki individu terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah. Menurut data BPS Kabupaten Sukoharjo jumlah rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo adalah 250.241 rumah tangga. Sedangkan muzakki yang terdaftar (memiliki NPWZ) di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sejumlah 2.712. Maka rasio muzakki individu terhadap rumah tangga daerah adalah 1%. Rasio 1% berada pada skor 2 dengan kategori lemah, dan nilai indeksnya 0,25 yang berarti kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo kurang baik pada variabel rasio muzakki individu terhadap rumah tangga daerah.

---

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016), hlm. 23

Pada Variabel rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha nasional/daerah. Variabel ini ada untuk mengamati peran dari badan usaha dalam membayar zakat. Akan tetapi, pada tahun 2021 belum ada muzakki badan yang terdaftar (memiliki NPWZ) di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu variabel ini mendapatkan skor 1 dalam kategori sangat lemah, karena hanya mendapatkan nilai rasio sebesar 0%. Nilai indeks pada variabel ini sebesar 0 yang berarti bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo pada variabel database jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) tidak baik.

Berdasarkan penjabaran diatas variabel database ini mendapatkan nilai indeks 0,2475 yang menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dalam variabel database ini kurang baik. Berikut perhitungan nilai indeksnya.

$$\begin{aligned} X_3 &= 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33} \\ X_3 &= 0,33(0,5) + 0,33(0,25) + 0,33(0) \\ &= 0,2475 \end{aligned}$$

### Hasil Analisa

Nilai Indeks Dimensi Makro didapatkan dari hasil perhitungan indikator-indikator yang berada didalam Indeks Dimensi Makro. Pada indikator regulasi ini mendapatkan skor 5 karena memiliki peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo mengenai pengelolaan zakat. Sehingga mendapat nilai indeks 1 yang menunjukkan dalam kategori kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sangat baik. Dalam hal ini regulasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo mengenai pengelolaan zakat pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/954 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di Jaringan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Kelompok Masyarakat.

Perzakatan di Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki peraturan yang harus dipertahankan dan diperbarui sesuai dengan kondisi Kabupaten Sukoharjo tanpa melanggar syariat. Dengan adanya peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo diharapkan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo lebih baik lagi dalam hal perzakatan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat.

Pada indikator kedua, dukungan APBD untuk BAZNAS. Alokasi APBD dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap BAZNAS Kabupaten Sukoharjo untuk

pelaksanaan pengelolaan zakat adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan perzakatan di Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan dukungan APBD sebesar Rp. 200.000.000 dan jumlah biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 742.675.494.

Dengan dukungan tersebut maka pada indikator ini mendapatkan skor 2 karena rasio kontribusi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sukoharjo 26% . Sehingga mendapatkan nilai indeks 0,25 yang termasuk dalam kategori kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang kurang baik pada indikator ini.

Selanjutnya pada indikator ketiga, database lembaga zakat terbagi menjadi tiga variabel. Variabel pertama jumlah lembaga zakat, muzakki, dan mustahik. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki database lembaga zakat resmi di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk data muzakki dan mustahik, BAZNAS Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 memiliki muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) 2.712 dan mustahik 11.055. sehingga pada variabel ini mendapat skor 3 karena memiliki 2 dari database yaitu data muzakki terdaftar ( memiliki NPWZ) dan data mustahik dan mendapatkan nilai indeks 0,5 yang menunjukkan bahwa pada variabel ini kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo cukup baik.

Variabel kedua jumlah muzakki individu terdaftar (memiliki NPWZ) mendapatkan skor 2 dengan kategori lemah karena muzakki individu terdaftar (memiliki NPWZ) di tahun 2021 berjumlah 2.712 dan jumlah rumah tangga daerah di Kabupaten Sukoharjo adalah 250.241 sehingga mendapatkan rasio 1%. Dan mendapatkan nilai indeks 0,25 yang berarti kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo kurang baik. Variabel ketiga jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) mendapatkan nilai indeks 0 yang menunjukkan kinerja pada variabel ini tidak baik. Sehingga nilai indeks pada indikator database lembaga zakat yaitu 0,2475 yang menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo pada indikator ini kurang baik.

Berdasarkan perhitungan Indeks Dimensi Makro diatas BAZNAS Kabupaten Sukoharjo mendapatkan nilai indeks 0,474 yang berarti masuk dalam kategori cukup baik. Berikut perhitungan nilai indeks dimensi makro.

$$\begin{aligned} X &= 0,30X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3 \\ &= 0,30(1) + 0,40(0,25) + 0,30(0,2475) \\ &= 0,474 \end{aligned}$$

Keterangan :

- X : Indeks Dimensi Makro  
 X1 : Indeks Indikator Regulasi  
 X2 : Indeks Indikator Dukungan APBD  
 X3 : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas tentang pengukuran kinerja dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional dapat disimpulkan bahwa perhitungan kinerja menggunakan Indeks Zakat Nasional pada dimensi makro, maka kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo masuk dalam kategori cukup baik dengan nilai indeks 0,474. Hal ini diperoleh dari tiga indikator yaitu: pertama indikator regulasi pada indeks dimensi makro mendapatkan nilai indeks 1 yang mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dari sisi indikator regulasi sangat baik. Kedua indikator dukungan APBD pada indeks dimensi makro yaitu 0,25 yang berarti bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dari sisi indikator dukungan APBD masih kurang baik. Ketiga indikator database lembaga pada indeks dimensi makro sebesar 0,2475 yang menjelaskan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dari sisi indikator database lembaga masih kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersina, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Star Up, 2018)  
 Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Desa Zakat 2.0* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017)  
 Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016)  
 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Sukoharjo  
 Farhatunnisa Hidayaneu, *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2017.  
 Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.  
 Hanafil Haq, dkk., *Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 6, Nomor 2, Desember 2020; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503  
 Junda Taqiyal, *Pengukuran Kinerja BAZNAS Kota Bekasi Dengan Indikator Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.  
 Medelina Shinta, *Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Mengukur Kualitas Jasa Lembaga Amil Zakat Di Surakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.  
 Nawawi, Ismail, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta : Prenada Media

- Group, 2013.
- Prasetyoningrum, *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah*. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2014.
- Ratih Nurasri, *Analisis Kinerja Zakat Daerah Dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional Pada Baznas Kota Tanggerang Selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2017
- Sulhan Zainul, *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram Dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional*. Skripsi, Fakultas 4Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Widiati dkk., *Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat*. Prosiding Keuangan dan Perbankan, 2017.
- Yandi Bastiar, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019.
- Yunita Hermawati. *Analisis Kinerja Pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 2017.
- <https://jateng.bps.go.id> diakses pada tanggal 17 April 2023
- <https://sukoharjokabbps.go.id> diakses pada tanggal 17 April 2023
- [https://pid.baznas.go.id/001\\_UU\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.PDF](https://pid.baznas.go.id/001_UU_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.PDF) diakses pada tanggal 7 Maret 2023